

MEMAHAMI PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN MEDIA

Andi Haris

Dosen pada Jurusan Sosiologi Universitas Hasanuddin Makassar
aharis@yahoo.com

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil penelitian pustaka yang di kombinasikan dengan pengamatan dilapangan yang mengkaji tentang proses kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana di ketahui jika pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu isu sentral yang ramai di wacanakan dari berbagai kalangan yang tentu saja tujuan utamanya untuk pembangunan masyarakat. Pasalnya, melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka kelompok yang menjadi sasaran penerima manfaat dapat di tingkatkan taraf hidup serta kesejahteraannya dengan cara memberi mereka penyuluhan, pelatihan dan bentuk kegiatan lainnya yang semuanya itu di maksudkan untuk melepaskan mereka dari ketidakberdayaan, keterasingan dan keterbelakangan. Selain itu, lewat kegiatan pemberdayaan masyarakat maka para klien di harapkan bisa bekerja secara mandiri agar supaya kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi.

Kata kunci: Pemberdayaan, Keterbelakangan, Inovasi.

ABSTRACT

This article was based on library research that combined with field observation that analysed about the process of social empowerment. As we know that social empowerment is the central issue which discussed by many people because the main goal of this topic is to achieve the target of community development. How ever, through social empowerment so that we can increase the welfare of the client by giving guidance and other activities and then they can be released from power lessness, social isolation and under development. Be saides that after participating in the social empowerment so the clients can work by themselves and thus they will fullfill their basic needs .

Key Words : Basic Needs, Underdevelopment, Innovation

A. Pendahuluan

Ketika berlangsung KTT (Konfrensi Tingkat Tinggi) MDGs (Millenium Development Goals) PBB (perserikatan bangsa-bangsa) dibulan September tahun 2000 yang dihadiri sebanyak 189 Negara dengan diwakili oleh kepala Negara dan kepala Pemerintahan yang kemudian sepakat melahirkan deklarasi MDGs (Tujuan pembangunan Millenium) dengan tujuan utamanya untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh semua negara seperti menanggulangi masalah kemiskinan dan kelaparan, mencapai pendidikan dasar untuk semua, mendorong terciptanya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, menurunkan tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi penyakit HIV/AIDS, malaria serta penyakit menular lainnya, memastikan keberlanjutan lingkungan hidup serta membangun kemitraan global untuk pembangunan.

Walaupun ada sebagian orang bersikap pesimis jika upaya untuk mencapai tujuan pembangunan millenium akan terealisasi pada 2015 mendatang namun ini bukan berarti hal tersebut bisa mereduksi komitmen deklarasi MDGs yang kala itu ditanda tangani oleh lebih dari seratus Negara. Buktinya, kita sebut saja misalnya usaha untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat masih saja terus digalakkan baik itu dari kalangan lembaga pemerintah maupun yang dilakukan para aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat. Apalagi, dengan semakin beragamnya muncul masalah sosial sehingga hal ini mendorong semua pihak untuk terus bekerjasama dalam memerangi segala bentuk keterbelakangan, isolasi sosial dan ketertinggalan. Bukan Cuma itu, lewat kegiatan pemberdayaan masyarakat akan dapat ditingkatkan keterampilan, keahlian dan pengetahuan para klien sehingga hal ini sangat membantu mereka untuk memenuhi

kebutuhan primernya dengan cara bekerja secara mandiri dan tanpa harus selalu menggantungkan harapan hidupnya dari bantuan orang lain.

Memang benar kalau proses kegiatan pemberdayaan masyarakat ini menghadapi tantangan yang cukup berat terutama yang bersentuhan dengan masalah dana yang di perlukan serta tenaga fasilitator yang profesional di bidangnya. Dalam hal ini, kaum penyuluh yang dinilai tepat dan mampu memainkan perannya dalam memberikan serta menyampaikan gagasan, konsep dan unsur inovasi lainnya pada klien tentu tidak hanya sebatas pada kemampuannya dalam membina kerja sama yang baik dengan kelompok penerima manfaat tetapi juga mereka ini sebaiknya bisa membaca situasi dan kondisi sosial ekonomi yang mencakup nilai budaya klien. Ini penting, mengingat dalam berbagai kasus yang terjadi di sejumlah tempat menunjukkan bahwa rupanya salah satu faktor penyebab kegagalan tenaga fasilitator dalam proses difusi inovasi. Pada kelompok penerima manfaat adalah bersumber dari ketidakmampuan mereka untuk mengelola sedemikian rupa nilai budaya lokal yang pada akhirnya berdampak pada munculnya reaksi penolakan kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan.

B. Pemanfaatan Media Sebagai Sumber Informasi

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi komunikasi informasi yang mana hal ini berdampak pada semakin mudahnya manusia mendapatkan berbagai sumber informasi yang berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum termasuk di dalamnya semua informasi yang berkaitan tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat. Adapun sumber informasi yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan data yang terkait dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat ini yaitu dapat diperoleh melalui media cetak baik itu dalam bentuk buku, majalah, jurnal ilmiah, surat kabar maupun dokumen yang ditulis dalam arsip penting yang membahas tentang pendekatan pemberdayaan masyarakat. Maupun melalui media elektronik terutama internet yang mana melalui pemanfaatan media tersebut akan diperoleh beragam informasi yang membahas tentang arti, prinsip dan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan agar kelompok tertentu masyarakat khususnya bagi

mereka yang berada di lapisan sosial bawah dapat diberdayakan segala potensi dan kemampuan yang mereka miliki agar supaya nantinya mereka mampu memenuhi berbagai kebutuhannya.

C. Pengertian

Masalah pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kegiatan penting yang perlu dilakukan dalam upaya untuk memberdayakan terutama pada kelompok yang dinilai lemah dan rentang terhadap kemiskinan sehingga mereka memiliki kemampuan dan kekuatan serta dapat melepaskan diri mereka dari berbagai keterpurukan, ketertinggalan dan keterbelakangan dan dengan demikian keinginan mereka untuk menjadi suatu kelompok yang maju, mandiri dan terpenuhi segala kebutuhannya bisa tercapai. Hanya saja istilah pemberdayaan ini seringkali tumpang tindih dengan istilah pembangunan meski keduanya sesungguhnya memiliki kaitan erat satu sama lain namun bagaimana pun juga konsep pemberdayaan boleh dikata merupakan terjemahan dari kata "*Empowerment*" sedangkan kata pembangunan merupakan istilah yang diterjemahkan dari kata "*Development*".

Meskipun begitu kedua konsep diatas tidak perlu dipertentangkan satu sama lain sebab kedua konsep ini senantiasa di-orientasikan pada suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik dalam semua bidang kehidupan masyarakat Rappaport (1984) misalnya mengartikan pemberdayaan sebagai suatu proses yang mana individu, organisasi dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu Osmani (2000) mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu kondisi dimana orang yang tidak berdaya menciptakan suatu situasi sedemikian rupa sehingga mereka mampu menyampaikan keinginannya dan sekaligus mereka merasa dilibatkan di dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan. Adapun menurut World bank (2001) lebih mengartikan kegiatan pemberdayaan sebagai usaha untuk memberi kesempatan serta kemampuan pada kelompok masyarakat yang dalam hal ini keluarga miskin untuk mampu dan berani bersuara dalam menyampaikan gagasan dan pendapat mereka serta memiliki keberanian untuk memilih suatu baik itu dalam bentuk metode, produk, tindakan maupun konsep yang dipandang terbaik tidak hanya pada keluarga dan pribadinya tapi juga bagi masyarakatnya.

Akan tetapi terlepas dari semua itu tujuan suatu pemberdayaan masyarakat pada dasarnya;

1. Dimaksudkan agar supaya individu, kelompok dan masyarakat memiliki kekuasaan atas kehidupannya
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sehingga mereka mampu keluar dari perangkap kemiskinan, ketidakterbantuan dan segala bentuk keterbelakangan. Dengan demikian kelompok yang tidak berdaya ini bisa mandiri dan tidak senantiasa tergantung pada individu atau kelompok lain dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Melalui kegiatan pada masyarakat dapat diciptakan suatu perubahan kearah yang lebih baik dalam semua aspek kehidupan masyarakat sehingga dapat ditingkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
4. Guna mencapai tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat maka ada beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya perlunya ditumbuhkan etos kerja yang kuat, bersikap hemat, efisien, efektif, akuntabel serta mengapresiasi prinsip keterbukaan. Pasalnya, perilaku dan budaya seperti ini memiliki peran yang sangat penting yang dapat mendorong serta mempercepat proses perubahan dalam masyarakat sehingga terbangun suatu komunitas yang kuat, maju dan mandiri dalam pencapaian tujuan pembangunan masyarakat.

Sekalipun demikian, upaya untuk mencapai sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat ini rupanya tidaklah semudah sebagaimana yang diperkirakan oleh kebanyakan orang buktinya, fakta dilapangan menunjukkan apabila ternyata muncul pula berbagai bentuk hambatan yang dampaknya berakibat pada lambatnya pencapaian sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kita sebut saja umpamanya maraknya kasus kejahatan tindak pidana korupsi terhadap anggaran yang telah disediakan sedemikian rupa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Belum lagi munculnya ketidak-setaraan serta perlakuan yang terkesan diskriminatif diantara semua komponen masyarakat, sulitnya memperoleh rasa keadilan terutama bagi orang pingiran, kinerja birokrasi yang tidak hanya dinilai tidak efektif,

berbelit-belit, menguras banyak dana, pelayanan publik yang tidak profesional tapi juga kerap kali birokrasi yang sepatutnya memainkan peran utamanya sebagai organisasi pelayanan publik justru malah hanya lebih mengutamakan pada pelayanan kepentingan kelompok tertentu khususnya bagi mereka yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika upaya yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan ini secara optimal pastilah memerlukan proses yang cukup lama selain harus didukung pula oleh sejumlah faktor lain yang didalamnya mencakup dana yang cukup, tenaga fasilitator / pendamping / agen pembaharu yang profesional dan terampil dalam bidangnya, motivasi yang kuat dari kalangan kelompok yang tidak berdaya, adanya kerja sama yang sinergis, solid dan baik diantara semua elemen masyarakat terutama yang memberi kontribusi bagi lancarnya kegiatan pemberdayaan masyarakat serta ditunjang pula oleh sarana yang memadai dalam mendukung semua aktivitas yang dilakukan dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Disamping itu, patut pula dipahami kalau kegiatan pemberdayaan masyarakat ini juga memiliki keterkaitan erat dengan masalah pembangunan masyarakat (Community development). Bahkan sering-kali kedua istilah ini digunakan secara tumpang tindih antara satu dengan yang lain apabila seseorang berbicara tentang pembangunan masyarakat. Walaupun demikian ada pendapat seperti yang dikemukakan oleh Giarci (2001) yang menganggap kalau pembangunan masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang memiliki pusat perhatian pada upaya untuk membantu masyarakat di berbagai lapisan agar supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan memanfaatkan segala sarana dan fasilitas yang ada baik itu dalam bertindak, merencanakan, mengelola serta mengembangkan lingkungan fisiknya sehingga kesejahteraan sosialnya dapat tercapai. Oleh sebab itu, dapat dijelaskan bahwa pembangunan masyarakat hanya dapat dilakukan kalau didukung oleh sumber daya manusia yang cakap, terampil, inovatif, kreatif memiliki etos kerja yang tinggi, bersikap terbuka terhadap perubahan dan pembaharuan serta mandiri dalam merespon setiap masalah yang ada yang mana perilaku seperti ini sangat mendorong terjadinya perubahan masyarakat kearah yang lebih maju, berkembang dan modern. Apalagi dalam proses pembangunan masyarakat amat

diperlukan adanya partisipasi aktif dan kerja sama yang baik diantara seluruh elemen masyarakat sehingga keinginan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera dalam semua aspek kehidupan manusia dapat terealisasi.

D. Prinsip Pemberdayaan

Salah satu aspek yang penting di bahas dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu masalah prinsip pemberdayaan yang terkait dengan persoalan kebijakan yang dapat di gunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberdayaan secara utuh, komprehensif dan menyeluruh sehingga sasaran yang ingin di capai terutama dalam memberdayakan kelompok yang di nilai sangat rentan terhadap masalah kemiskinan dapat terealisasi. Apalagi, dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks serta beragam bentuknya maka pemilihan kebijakan yang di anggap tepat, efektif dan akan menghasilkan sesuatu yang optimal dapat terwujud. Menurut Dahana dan Bhatnagar (1980) bahwa ada beberapa prinsip yang perlu di perhatikan dalam proses pemberdayaan di antaranya :

1. *Kerja sama dan partisipasi* . Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan hanya dapat berhasil di laksanakan apabila terdapat kerja sama yang sifatnya solid diantara berbagai elemen masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam merealisasikan program yang sudah di rancang sebelumnya
2. *Menggunakan metode yang tepat*. Maksudnya metode yang di gunakan sebaiknya di sesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan sehingga metode tersebut tidak hanya bersifat efisien dan efektif tetapi juga dapat berdaya guna serta berhasil guna
3. *Demokratis*. Maksudnya dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan maka sebaiknya proses yang berlangsung hendaknya bersifat demokratis dalam arti memberi kesempatan secara longgar dan leluasa pada masyarakat untuk memilih metode mana yang sepantasnya di gunakan termasuk dalamnya proses pengambilan keputusan yang di buat masyarakat sendiri.
4. *Minat dan kebutuhan*. Dalam hal ini pemberdayaan masyarakat harus lah di dasarkan pada sesuatu yang memang menjadi prioritas utama dan terkait dengan minat dan kebutuhan masyarakat sehingga hasil yang di peroleh lebih efisien dan efektif.
5. *Kelompok masyarakat bawah*. Untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program yang di buat sebelumnya maka sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sebaiknya lebih diarahkan pada mereka yang termasuk dalam kategori orang pinggiran dalam arti berada pada tingkat akar rumput masyarakat.
6. *Keragaman budaya*. Kegiatan pemberdayaan masyarakat seyogyanya di sesuaikan dengan keragaman budaya lokal yang ada dengan alasan apabila kegiatan itu di lakukan dengan menggunakan prinsip pada keseragaman budaya makan di khawatirkan hal ini akan menimbulkan berbagai persoalan dan hambatan di lapangan.
7. *Terarah dan spesialis*. Untuk konteks ni tenaga fasilitator/ penyuluh/agen pembaharu yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat harus terdiri orang yang memiliki keahlian serta keterampilan dalam hal tertentu terutama pada kegiatan yang membutuhkan tenaga spesialis untuk kegiatan yang merupakan bagian dari agenda pemberdayaan masyarakat.
8. *Belajar sambil bekerja*. Maksudnya kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak sekedar tidak dilakukan dalam bentuk menyampaikan konsep dan gagasan yang bersifat teoritis akan tetapi yang jauh lebih penting yaitu mengikutsertakan secara aktif kelompok sasaran untuk mencoba melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan apa yang diarahkan oleh tenaga fasilitator sehingga dengan demikian masyarakat dapat bekerja sambil belajar menggunakan konsep yang mereka peroleh dari para penyuluh.
9. *Perubahan budaya*. Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan masyarakat haruslah di lakukan sesuai dengan nilai budaya lokal kelompok sasaran. Dengan demikian dapat di hindari timbulnya kejutan budaya di kalangan kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan dan oleh sebab itu para penyuluh sangat di tuntut untuk bertindak secara hati-hati dan

harus mengetahui terlebih dahulu dengan baik nilai budaya kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan.

10. *Kepemimpinan.* Maksudnya kegiatan pemberdayaan dilakukan tidak boleh hanya menguntungkan pada suatu pihak saja misalnya di kalangan mereka yang melakukan penyuluhan. Tapi, justru yang diinginkan yaitu hendaknya kegiatan pemberdayaan ini dapat di manfaatkan tokoh masyarakat yang ada dan di harapkan dapat membantu kelancaran kegiatan pemberdayaan.
11. *Segenap keluarga.* Maksudnya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan di kalangan tenaga penyuluh sebaiknya memperlakukan keluarga sebagai suatu bagian sistem sosial dengan cara mengaktifkan peran anggota keluarga untuk saling bekerja satu sama lain agar supaya harapan untuk mencapai sasaran kegiatan pemberdayaan dapat terealisasi.

Sementara itu menurut pendapat beberapa pakar lain yang kemudian di rumuskan oleh Suharto (2005) menjelaskan bahwa beberapa prinsip yang perlu di perhatikan dalam proses pemberdayaan masyarakat jika dilihat dari perspektif pekerjaan sosial diantaranya:

Pertama, pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karena pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.

Kedua, proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.

Ketiga, masyarakat harus di lihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan

Keempat, kompetensi diperoleh atau di pertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat

Kelima, solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.

Keenam, jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang

Ketujuh, masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri : tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.

Kedelapan, tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.

Kesembilan, pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.

Kesepuluh, proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.

Dan akhirnya kesebelas, pember-dayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

E. Tujuan

Sebagai suatu proses sosial yang bergerak secara dinamis dengan melibatkan partisipasi aktif serta kerja sama yang baik antara tenaga fasilitator, pemerintah dan kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan maka dapat di jelaskan apabila pada dasarnya tujuan proses pemberdayaan itu untuk menciptakan perubahan kehidupan sosial ekonomi di kalangan kelompok lapisan bawah masyarakat agar supaya mereka memiliki kekuatan dan kemampuan untuk dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan secara terencana, terprogram dan berkelanjutan dengan tujuan untuk :

1. Memperkenalkan berbagai konsep dan unsur inovasi yang lain baik itu berupa gagasan, perilaku maupun dalam bentuk hasil karya manusia yang sifatnya baru pada kelompok sasaran kegiatan.
2. Memberikan keterampilan dan membantu masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan secara mandiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi mereka

3. Meningkatkan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap suatu informasi yang mana di harapkan dengan semakin membaiknya pemahaman kelompok sasaran terhadap inovasi tersebut akan berdampak pada munculnya sikap serta perilaku mereka untuk bisa bekerja lebih kreatif dan inovatif.
4. Kalau pun sekiranya ada bantuan dalam bentuk modal untuk berusaha maka semua itu di maksudkan untuk lebih mendorong kreativitas kelompok sasaran agar mereka bisa bekerja mandiri dan tidak senantiasa mengharapakan bantuan orang lain
5. Karena proses pemberdayaan masyarakat ini pada prinsipnya untuk membangun motivasi dengan memanfaatkan semua potensi yang di miliki oleh masyarakat maka mau tak mau kegiatan yang di lakukan senantiasa mendapat bimbingan serta pengawasan dari tenaga fasilitator agar supaya apa yang menjadi sasaran utama kegiatan tersebut dapat tercapai

F. Pendekatan

Salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat di pengaruhi oleh jenis pendekatan yang di gunakan dalam melakukan kegiatan tersebut. Dalam hal ini pendekatan yang di maksud terkait dengan cara yang di gunakan agar supaya masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan bersikap terbuka dalam menerima berbagai bentuk unsur inovasi yang semuanya itu di maksudkan agar supaya mereka dapat melepaskan diri dari berbagai aneka rupa keterbelakangan, isolasi sosial, keterpurukan serta ketertinggalan dalam berbagai sektor masyarakat. Oleh sebab itu untuk memilih pendekatan yang di nilai cocok dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya kelompok sasaran maka pada dasarnya ada beberapa hal yang perlu di perhatikan diantaranya : pertama kegiatan itu harus sifatnya terencana. Maksudnya program yang di buat sebaiknya memiliki rentan waktu tertentu dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti lembaga pemerintah, aktivis LSM, tokoh masyarakat, pemuka agama, tokoh generasi muda dan kelompok masyarakat yang lain yang di nilai akan memberi kontribusi yang besar bagi kegiatan pemberdayaan tersebut. Kedua, pendekatan yang di gunakan sebaiknya

dalam bentuk kelompok dan tidak di lakukan secara individual. Pertimbangannya lewat pendekatan kelompok maka kegiatan yang di laksanakan dapat berlangsung lebih efisien, efektif serta memberi hasil yang optimal di bandingkan dengan kegiatan yang di lakukan secara perorangan. Apalagi, tujuan utama kegiatan ini jelas lebih di orientasikan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya sebatas pada satu rumah tangga. Ketiga, melibatkan masyarakat secara aktif terutama kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan. Ini sangat penting mengingat partisipasi aktif masyarakat akan memberikan manfaat secara langsung selain mereka dapat bekerja sambil belajar untuk mempraktekkan berbagai konsep dan program yang di sampaikan oleh para fasilitator. Keempat, sasarannya harus jelas dan terarah. Artinya semua agenda kegiatan yang tawarkan pada kelompok sasaran memiliki tujuan yang jelas termasuk di dalamnya manfaat yang dapat di peroleh dari kegiatan itu khususnya yang bersentuhan langsung dengan masalah pemenuhan kebutuhan manusia. Kelima, kegiatan pemberdayaan masyarakat harus memiliki dana yang cukup. Sebagaimana di ketahui bahwa program yang dirancang sedemikian rupa dan sebaik apapun bentuknya tentu terasa sulit untuk di implementasikan apabila tanpa di dukung oleh dana yang memadai. Di samping itu, masalah pengadaan infrastruktur termasuk alat peraga yang di perlukan bukan serta melibatkan sejumlah tenaga profesional hanya dapat di lakukan jika di tunjang oleh sektor finansial yang cukup. Keenam, masalah faktor budaya yang dimiliki kelompok sasaran harus pula mendapat perhatian yang serius. Masalahnya, jika kita belajar dari berbagai pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa munculnya penolakan dari masyarakat setempat ternyata di sebabkan karena adanya sikap tradisi dan kepercayaan yang begitu kuat yang di miliki masyarakat dan dianggap tidak sesuai dengan unsur inovasi yang di perkenalkan kepada mereka. Akibatnya upaya yang di lakukan oleh tenaga fasilitator dalam menciptakan perubahan sikap dan perilaku masyarakat tidak memberikan hasil yang maksimal. Dan akhirnya, pendekatan yang di gunakan sebaiknya bersifat persuasif dan tidak kohersif dengan demikian, kelompok sasaran akan menerima program yang di tawarkan pada mereka secara sukarela tanpa merasa adanya tekanan dari pihak luar sehingga proses kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung dalam suasana yang

koperatif, komformis, lancar, bersinergi dan terkendali.

Sementara itu dalam kaitannya dengan pekerja sosial maka setidaknya ada 3 jenis pendekatan yang bisa digunakan untuk membantu bagi tenaga penyuluh, fasilitator, agen pembaharu dan aktifis LSM serta lembaga pemerintah dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya:

1. Pendekatan Mikro

Dalam hal ini kegiatan pemberdayaan dilakukan pada kelompok sasaran sifatnya individual misalnya dalam bentuk konseling, bimbingan serta pengendalian stres yang mana tujuannya tentu saja dimaksudkan untuk melatih serta memberi bimbingan bagi para kelompok sasaran (penerima manfaat) untuk melaksanakan kegiatannya sehari-hari. Dengan kata lain model pendekatan ini biasa juga disebut dengan pendekatan yang berpusat pada tugas.

2. Pendekatan Mezzo

Tidak seperti halnya dengan pendekatan mikro yang mana pemberdayaan dilakukan secara individual maka justru dalam pendekatan ini pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok penerima manfaat. Dalam hal ini, tujuan kegiatan pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien dengan harapan pemanfaatan kelompok dapat difungsikan sebagai media, pendidikan, pelatihan dan intervensi sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan keterampilan, kesadaran, membentuk sikap serta meningkatkan kemampuan kelompok sasaran (penerima manfaat) dalam mengatasi berbagai persoalan yang mereka hadapi.

3. Pendekatan Makro

Untuk tipe pendekatan ini biasa juga disebut sebagai strategi sistem besar dengan alasan penerima manfaat (klien) diarahkan pada suatu lingkungan yang lebih luas. Selain itu ada beberapa jenis strategi yang bisa dikategorikan dalam pendekatan makro diantaranya perencanaan sosial, aksi sosial, kampanye, perumusan kebijakan, lobbying serta manajemen konflik. Disamping itu pendekatan ini juga melihat para penerima manfaat (kelompok sasaran) sebagai kelompok yang memiliki kemampuan dalam memahami baik itu situasi mereka sendiri maupun cara memilih strategi yang dinilai tepat untuk mengatasinya.

Disamping sejumlah pendekatan yang biasa digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana disebutkan diatas maka rupanya ada pula beberapa jenis pendekatan yang dapat digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kita sebut saja misalnya model pendekatan yang digunakan Elliot (1996) yang menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu:

4. Pendekatan Kesejahteraan.

Dengan menggunakan pendekatan ini, fokus utamanya lebih dipusatkan pada kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat termasuk didalamnya bagi mereka yang menghadapi musibah seperti bencana alam apakah itu berupa banjir, letusan gunung berapi, kekeringan yang berkepanjangan atau dalam bentuk bencana alam yang lain.

5. Pendekatan Pembangunan.

Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan model pendekatan ini yang mana lebih difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kemandirian, keswadayaan serta kemampuan masyarakat.

6. Pendekatan Pemberdayaan

Dalam hal ini perlu dilakukan berbagai bentuk kegiatan pelatihan di kalangan kelompok sasaran (klien) agar mereka bisa melepaskan diri dari kemiskinan, keterpurukan serta ketinggalan sehingga mereka dapat membentuk suatu kelompok yang maju dan mandiri serta bebas dari aneka ragam ketidakberdayaan.

Sedangkan menurut Axinn (1988) Yang menyebutkan bahwa untuk memahami lebih rinci pendekatan yang digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat maka paling tidak jenis pendekatan yang dipakai dapat dikategorikan ke dalam kedalam beberapa tipe misalnya : Pertama, pendekatan komunitas. Kedua, pendekatan umum. Ketiga, pendekatan proyek. Keempat, pendekatan kerjasama. Kelima, pendekatan partisipatif. Keenam, pendekatan pelatihan dan kunjungan. Ketujuh, pendekatan lembaga pendidikan. Dan kedelapan, pendekatan pembangunan sistem usaha tani. Oleh sebab itu mengingat begitu kompleksnya jenis pendekatan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga tidak

mengerankan jika Mardikanto (2012) mengemukakan bahwa terdapat sejumlah prinsip pemberdayaan yang dapat digunakan sebagai kerangka acuan diantaranya :

1. Keberhasilan pemberdayaan sangat tergantung pada kejelasan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.
2. Masalah efektivitas pemberdayaan kedisiplinan, keseriusan serta sikap profesional dikalangan para fasilitator
3. Adanya kemauan dan partisipasi untuk ikut terlibat dalam konteks pengabdian pemberdayaan tergantung pada sejauh mana masyarakat di beri kesempatan dalam proses perumusan tujuan program dan pemilihan mereka yang terlibat di lapangan
4. Adanya pemanfaatan kombinasi antara pengetahuan dan informasi baik itu dari dalam maupun di luar masyarakat dinilai dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan
5. Perlunya lebih di pertimbangkan masalah faktor budaya masyarakat dengan harapan hal ini bisa mengefektifkan kegiatan pemberdayaan
6. Kalau sistem administrasi pemerintahan bersifat desentralisasi maka tentu hal ini dapat berpengaruh pada lebih meningkatnya partisipasi masyarakat
7. Untuk lebih mengefektifkan klien (penerima manfaat) dengan para fasilitator maka perlu lebih di perhatikan penggunaan pendekatan gender dalam kegiatan pemberdayaan
8. Kelihatannya pemberdayaan akan lebih efektif jika berlangsung dalam masyarakat yang lebih tertutup dalam arti sering terjadi kontak serta komunikasi antara para fasilitator dengan para penerima manfaat
9. Untuk lebih mengefektifkan kegiatan pemberdayaan tentu harus pula di tolong oleh suatu kepemimpinan yang efektif
10. Kegiatan pemberdayaan juga akan lebih efektif apabila terjadi komunikasi yang berlangsung secara timbal balik antara peneliti, penjual produk, penyedia input serta masyarakat.
11. Kegiatan fasilitator sangat berpengaruh dalam menumbuhkan serta mendorong partisipasi masyarakat yang mana hal ini ikut pula mempengaruhi dalam kegiatan proses belajar dan penerimaan inovasi.
12. Adanya pemahaman yang begitu baik diantara mereka yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat akan sangat pula mempengaruhi keberhasilan kegiatan pemberdayaan.
13. Adanya keselarasan antara jumlah biaya yang di keluarkan dalam kegiatan pemberdayaan dengan manfaat yang dapat di peroleh dari kegiatan itu akan semakin besar apabila senantiasa di perhitungkan berbagai faktor yang ikut mempengaruhinya dari waktu ke waktu pada setiap tempat kegiatan berlangsung.
14. Masalah kontinuitas (keberlangsungan) kegiatan dapat dijaga dan di pelihara dengan baik jika manfaat yang di peroleh jauh lebih besar ketimbang biaya yang harus di keluarkan
15. Masalah keluwesan dan kepekaan terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat serta terbatasnya tujuan yang ingin di capai pada peningkatan produksi yang mana semua ini sangat berpengaruh bagi efektifnya kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Masalah pemilihan pendekatan yang dinilai tepat dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat boleh dikata merupakan salah satu hal yang harus mendapat perhatian yang serius mengingat apabila mereka yang ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan ini memanfaatkan pendekatan yang tidak tepat, keliru dan tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat penerima manfaat (klien) maka tidak hanya menimbulkan kerugian materi, menyita waktu tapi juga kegiatan tersebut tidak memberikan hasil yang optimal sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Apalagi, kelompok yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan memiliki latar belakang sosial ekonomi dan budaya berbeda satu sama lain sehingga tentu saja model pendekatan yang digunakan haruslah disesuaikan dengan kemampuan, persepsi, perilaku dan budaya masyarakat setempat. Oleh sebab itu, wajar jika sebelum melakukan kegiatan pemberdayaan termasuk didalamnya merancang agenda program

kegiatan yang ingin diperkenalkan pada klien maka tentu sebaiknya dilakukan studi peninjauan lebih dahulu untuk mempelajari situasi dan kondisi sosial, ekonomi serta budaya masyarakat setempat.

Tak hanya itu, pendekatan yang digunakan juga hendaknya mampu membangkitkan semangat dan motivasi dikalangan para penerima manfaat sehingga unsur inovasi dan beragam bentuk bantuan lainnya dapat dikelola secara optimal dengan harapan akan terjadi suatu perubahan yang berkesinambungan kearah yang lebih baik yang mencakup semua aspek kehidupan manusia. Memang benar dan kita harus mengakui apabila pendekatan yang digunakan sepatutnya memiliki cakupan yang lebih luas dengan memperhitungkan berbagai sudut pandang masyarakat sehingga dengan demikian tantangan yang sedemikian rumit dan berat apapun bisa diatasi yang didalamnya mencakup perlunya diantisipasi kemungkinan munculnya sikap penolakan dari masyarakat. Oleh sebab itu dengan bertitik tolak dari sejumlah pendekatan pemberdayaan masyarakat yang ada dan dengan tetap mempertimbangkan beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum digunakan suatu pendekatan maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa suatu pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dinilai baik dan cocok untuk diterapkan apabila telah memenuhi sejumlah persyaratan diantaranya:

1. Mudah dipahami dan dimengerti dikalangan kelompok penerima manfaat
2. Pendekatan itu dinilai lebih efisien dan efektif dalam arti memiliki model yang sederhana namun bisa memberi manfaat yang maksimal bagi klien
3. Melibatkan fasilitator yang memiliki keahlian serta keterampilan dibidangnya sehingga mereka mampu bekerja secara profesional
4. Sekalipun pendekatan tersebut menciptakan perubahan bagi masyarakat tapi bukan berarti menghilangkan sama sekali nilai budaya lokal yang selama ini menjadi faktor perekat solidaritas sosial diantara sesama warga masyarakat karena tidak semua individu yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan memiliki kompetensi yang sama maka pendekatan yang digunakan haruslah bisa mengakomodasi berbagai bentuk kekurangan

yang dimiliki masyarakat dan kemudian secara persuasif mengatasi segala keterbatasan yang dimiliki individu tersebut lalu melepaskan mereka dari perangkap keterpurukan, kemiskinan dan keterbelakangan.

5. Penggunaan pendekatan pemberdayaan masyarakat harus pula dilakukan secara cermat, terukur, teliti, bertahap, berkelanjutan serta tepat sasaran sehingga semua elemen yang menjadi kelompok penerima manfaat dapat diberdayakan dengan utuh dan tanpa merasa ada yang diperlakukan diskriminatif dari mereka yang memberi kontribusi bagi keberhasilan kegiatan tersebut.
6. Agar supaya pendekatan ini dapat mempercepat terwujudnya suatu masyarakat yang mandiri maka tentu prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsif dan kesetaraan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan kelompok sasaran yang diposisikan sebagai klien maka untuk membedakan antara kelompok ini dengan warga masyarakat lainnya paling tidak ada beberapa hal yang harus diperhatikan di antaranya karakteristik sosial, ekonomi, dan perilaku individu. Dalam hal ini, pada dasarnya mereka yang menjadi sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat terdiri dari keluarga yang berada pada lapisan sosial bawah misalnya saja kaum orang pinggiran atau keluarga miskin yang mana pada umumnya mereka dianggap sulit untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang didalamnya mencakup sandang, pangan, dan perumahan yang layak. Itulah sebabnya melalui kegiatan pemberdayaan tersebut mereka di harapkan dapat di tingkatkan taraf hidup serta kesejahterannya lewat peningkatan tingkat pendidikan dan keterampilan yang mana semua ini di pandang penting sebagai modal sosial guna dapat bekerja dengan mandiri sehingga keinginannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya dapat terealisasi. Meskipun masih terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejumlah pakar ilmu sosial tentang konsep kelompok sasaran dan penerima manfaat yang dalam hal ini ada sebagian di antara mereka yang membedakan kedua istilah tersebut namun sebetulnya apabila di kaji lebih jauh mengenai makna kedua konsep di atas yang mana pada prinsipnya memiliki substansi yang sama. Oleh

karena itu, tujuan utama kita yaitu bukan untuk mempertentangkan kedua istilah di atas melainkan yang justru perlu di pahami adalah konsep di atas memiliki tujuan yang sama.

G. Peran Penyuluh

Jika kita merujuk pada undang-undang No. 16 tahun 2006 yang menjelaskan tentang penyuluh/ fasilitator atau menurut istilah Rogers yang di sebutnya sebagai Agen Pembaharu, maka kategori penyuluh ini dapat di bagi kedalam tiga tipe, yaitu :

1. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang terdiri atas tenaga fasilitator dengan status sebagai pegawai negeri yang bekerja di lembaga pemerintah dengan tugas memberikan penyuluhan pada masyarakat dalam berbagai bentuk kegiatan
2. Penyuluh yang bekerja pada lembaga swasta termasuk dari kalangan kaum aktivis lembaga swadaya masyarakat dengan tugas menyampaikan dan memberi penyuluhan untuk kegiatan pembangunan pada kelompok penerima manfaat
3. Penyuluh yang di tunjuk dan berasal dari masyarakat sendiri dan mereka ini biasanya mereka ini tidak mendapat gaji dari masyarakat karena kegiatan yang di lakukan para fasilitator dalam tipe kategori ini bekerja secara sukarela bagi kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Walaupun demikian, terlepas dari bagaimana bentuk dan tipe penyuluh yang muncul dan bekerja dalam menyampaikan gagasan, konsep, hasil karya manusia atau dalam bentuk yang lain dan di pandang baru bagi kelompok sasaran kegiatan sehingga para penerima manfaat ini akan mengalami suatu perubahan status sosial ekonomi kearah yang lebih baik yang jelas kaum penyuluh tentu pada umumnya harus memiliki sejumlah prinsip diantaranya:

Pertama, mereka sebaiknya tidak menciptakan ketergantungan bagi kelompok penerima manfaat namun justru yang sebaliknya di harapkan adalah mereka mampu membangun serta mendorong terbentuknya kemandirian di kalangan kelompok sasaran kegiatan pember-dayan. *Kedua*, para penyuluh senantiasa di tuntutan agar mereka supaya bekerja secara professional sehingga keinginan

untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di antara para penerima manfaat dapat tercapai.

Ketiga, para penyuluh juga selalu di tuntutan agar mereka bisa membangun kerja sama yang baik dengan kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan yang di dalamnya meliputi pula perlunya menggalang kekuatan yang kuat, akrab dan harmonis dengan tokoh masyarakat yang di nilai memiliki pengaruh yang besar dan dapat membantu kaum penyuluh untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih maju bagi masyarakat. *Keempat*, para penyuluh harus bisa membangun motivasi dan semangat bekerja serta berusaha di kalangan kelompok penerima manfaat.

Kelima, kaum penyuluh hendaknya memiliki sikap dan perilaku yang kooperatif serta senantiasa mengedepankan pendekatan persuasive apabila mereka menghadapi tantangan, kritik dan reaksi penolakan dari masyarakat. Dan akhirnya para penyuluh juga sebaiknya memiliki sikap yang pantang menyerah, mampu bekerja secara berkelanjutan dan tetap berusaha seoptimal mungkin untuk menumbuhkan rasa percaya diri, etos kerja dan keinginan untuk maju di kalangan kelompok penerima manfaat.

Kemudian menurut Rogers dan Shoemaker (1971) menyebutkan bahwa peranan yang perlu dilakukan oleh agen pembaharu dalam mempromosikan unsur inovasi kepada klien (Kelompok sasaran kegiatan pemberdayaan masyarakat) yaitu:

1. *Menumbuhkan kebutuhan untuk mengalami perubahan.*

Maksudnya seorang agen pembaharu hendaknya mampu berperan sebagai katalisator bagi kliennya. Untuk itu mereka sebaiknya bisa merumuskan suatu solusi yang baru dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi klien dengan cara membangun suatu keyakinan dalam diri klien agar supaya para klien tersebut dapat memecahkan dan menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Ini penting mengingat salah satu ciri khas yang biasanya dimiliki kaum klien yakni rendahnya motivasi untuk berubah, sikap pasrah terhadap keadaan yang ada serta tidak adanya perencanaan yang baik yang mereka miliki

2. *Mampu mendiagnosis permasalahan yang ada.*

Artinya seorang agen pembaharu diharapkan bisa membaca situasi termasuk masalah yang dihadapi dan dialami kliennya dengan melihat persoalan itu dari perspektif klien. Karena itu, untuk memahami situasi yang sifatnya problematis ini sudah pasti menuntut adanya sikap empati yang tinggi dikalangan agen pembaharu/penyuluh.

3. *Menciptakan hubungan yang baik untuk perubahan.*

Salah satu faktor yang bisa mendukung suksesnya peran agen pembaharu dalam melaksanakan tugasnya amat dipengaruhi oleh terciptanya hubungan yang akrab, harmonis dan kerjasama yang baik antara agen pembaharu dengan kliennya. Hanya saja, guna memelihara dan melanggengkan hubungan baik ini sudah barang tentu didukung pada munculnya kesan yang baik dimata klien misalnya saja agen pembaharu dinilai jujur, punya rasa empati yang kuat serta dapat dipercaya.

4. *Memiliki perencanaan untuk men-ciptakan perubahan.*

Ini dimaksudkan agar seorang agen pembaharu/pemilu mampu memainkan perannya secara optimal dan tidak hanya sebatas menumbuhkan minat serta perhatian klien terhadap unsure inovasi yang diperkenalkan pada mereka tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah terjadinya perubahan terhadap perilaku klien setelah mereka mengadopsi unsur inovasi.

5. *Senantiasa berusaha mencegah terjadinya kemacetan dan tetap menjaga keberlangsungan pembaharuan.*

Dalam hal ini peran yang diharapkan dari agen pembaharu dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu tetap memberi informasi yang sifatnya mendukung kegiatan pembaharuan dan perubahan bagi klien dan dengan demikian mereka yang diposisikan sebagai penerima manfaat ini selalu merasa aman dan tenang dalam mengadopsi unsur inovasi.

4. *Membangun motivasi para klien untuk berubah.*

Salah satu peran lain yang harus dilakukan para agen pembaharu/ penyuluh adalah menggunakan strategi sedemikian rupa

dengan tujuan untuk membangkitkan minat dan perhatian kelompok sasaran pemberdayaan dengan tetap mengutamakan prinsip yang berorientasi pada kebutuhan klien.

5. *Mencapai hubungan maksimal.*

Artinya kaum agen pembaharu sebaiknya berusaha untuk menjadikan kliennya nantinya berperan pula sebagai agen perubahan setidaknya untuk dirinya sendiri sehingga mereka mampu memilih unsur inovasi mana saja yang dinilai cocok bagi kebutuhannya. Kalaupun sekiranya tujuan ini sudah tercapai maka terbuka kemungkinan agen perubahan itu untuk sementara memutuskan hubungannya dengan kliennya dan mereka dapat berkomunikasi kembali apabila ada unsur inovasi lain yang ingin diperkenalkan pada klien.

Selain itu menurut pakar komunikasi pembangunan ini bahwa keberhasilan para agen pembaharu dalam proses difusi inovasi akan dipengaruhi pula oleh beberapa faktor seperti: Pertama, gencarnya usaha promosi. Kedua, lebih berorientasi pada kebutuhan klien (kelompok penerima manfaat). Ketiga, membangun kerjasama yang baik dengan para tokoh masyarakat dan Keempat, terjaganya kredibilitas (sikap dapat dipercaya) para agen perubahan/penyuluh dimata klien.

Adapun menurut Havelock (1973) bahwa ada beberapa peranan yang harus di mainkan agen perubahan dalam proses difusi inovasi antara lain :

1. Berperan sebagai katalisator dalam rti mereka dapat memotivasi masyarakat untuk siap bersedia melakukan perubahan
2. Membantu masyarakat dalam mencari solusi untuk memecahkan persoalan yang ada
3. Ikut membantu dalam proses difusi inovasi dan juga memainkan peran dalam member petunjuk bagi masyarakat tentang bagaimana seharusnya mereka :
 - a. Mengetahui permasalahan serta menentukan tujuan
 - b. Memahami dan mampu merumuskan suatu kebutuhan
 - c. Memilih dan mengatasi masalah yang ada

- d. Memperoleh berbagai sumber yang terkait dengan proses kegiatan penyebaran inovasi
 - e. Mampu membuat rencana pemecahan masalah secara bertahap
4. Menjadi mata rantai/penghubung dengan berbagai sumber yang di perlukan untuk mengatasi masalah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adi, Isbandi Rukminto.2001. *Pem-berdayaan, Pengembangan Mas-yarakat dan Intervens Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- [2] Ala, Andre Bayo.1981. *Kemiskinan dan Strategi Memerang Kemiskinan*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.Alvin, Y. SO. 1994. *Perubahan Sosial dan Pembangunan*. Jakarta:LP3ES.
- [3] Anwas, M Oos.2013. *Pemberdayaan MasyarakatdiEra Global*. Bandung: Penerbit Alfabeta Axinn.G.H.1988. *Guide on Alternative Extension Approaches*. Romeo: FAO.
- [4] Baldwin, E, Robert. 1981. *Pem-bangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Berkembang*. Jakarta: Bina Aksara. Bhatnagar. 1990. *Education and Communication for Develop-ment*.New Delhi : Oxford & IBH Publishing CO.
- [5] Budiman, Arif. 1995. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: T.Gramedia. Bryant, Coralie.1987. *Manajemen Pembangunan Negara Berkembang*. Jakarta:LP3ES.
- [6] Chambers,Robert.1987. *Pembangunan Desa: Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- [7] Clements P, Kevin. 1997. *Teori Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [8] Combs H, Philip .1974. *Attacking Rural Poverty, How Non Formal Education Can Help*. Baltimore:The John Hopkins University Press.
- [9] Elliot, J.A.1996.*An Introduction to Sustainable Development: The Developing world*.Routledge. London and New York.
- [10] Fakih, Mansour. 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press
- [11] ----- . 2010. *Masyarakat sipil untuk transformasi sosial*.Yogyakarta:Insist Press
- [12] Havelock.1973. *The Change Agent's Guide to Innovation in Education*. N.J : Educational Technology Publications
- [13] Hettne, Bjorn. 1985. *Ironi Pem-bangunan Di Negara Berkembang*. Jakarta: Sinar Harapan.
- [14] H.W.Arndt. 1983. *Pembangunan Dan Pemerataan*. Jakarta: LP3ES.
- [15] I.L.Pasaribu 1982. *Sosiologi Pembangunan*. Bandung: Tarsito
- [16] Khairuddin. 2000. *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty
- [17] Korten, David C.1984.*Pembangunan yang Memihak Rakyat*. Jakarta: Yayasan studi pembangunan.
- [18] Lane, Jan Erik.1994. *Ekonomi Politik Komparatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [19] Learner, Daniel. 1983. *Memudarnya Masyarakat Tradisional*. Yogyakarta : Gadjah Mada, University Press.
- [20] Lewis P, John.1987. *Mengkaji Ulang Strategi-Strategi Pembangunan*.Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- [21] Long, Norman. 1987. *Sosiologi Pembangunan Pedesaan*. Jakarta: PT.Gramedia.
- [22] Mardimin, Johannes. 1994. *Jangan Tangisi Tradisi*.Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- [23] ----- .1996. *Dimensi Kritis Proses Pembangunan Di Indonesia* Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- [24] Mardikanto, Totok.2012*Pember-dayaan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- [25] Moeljarto.1987. *Politik Pembangunan*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- [26] Mountjoi B,Alan.1984.*Dunia Ketiga dan Tinjauan Permasalahannya*. Jakarta:Bumi Aksara.
- [27] Nasution, Zulkarimein.1988. *Komunikasi - Pembangunan*.Jakarta: Rajawali Pers
- [28] Ndraha, Talizudulu. 1987.*Pem-bangunan Masyarakat Mempersiap-kan Masyarakat Tinggal Landas* Jakarta:PT Bina Aksara

- [29] Osmani. 2000. *Participatory Governance, People's Empowerment and Poverty*. Washington: UNDP
- [30] Rappaport.1984.*Studies in Empowerment: Introduction to the Issue Prevention In Human Issue*, USA
- [31] Rogers dan Shoemaker. 1971. *Communication of Innovation*.New York.The Free Press
- [32] -----,1985. *Komunikasi dan Pembangunan*. Jakarta: LP3ES
- [33] Setiana, LuciSSSSSe.2005. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat* Jakarta: Ghalia Indonesia
- [34] Sjafrri Hubes, Aida Vitayala (Ed). 1992. *PenyuluhanPembangunan Indonesia:Menyosong Abad XXI* Jakarta: PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.
- [35] Sjahrir. 1986. *Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok*.Jakarta: LP3ES
- [36] Soetomo.2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- [37] Suharto, Edi.2005.*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT Refika Aditama Tjokrowinoto
- [38] Moeljarto.1996.*Pembangunan, Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar